



Etika Islam sebagai Fondasi dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan

Sumarta

IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu
martasumarta548@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i2.203>

Disubmit: (2025-01-11) | Direvisi: (2025-05-06) | Disetujui: (2025-05-30)

Abstract

Islamic ethics play a crucial role as the foundation for inclusive and just economic development. Concepts such as justice, honesty, and balance within Islamic teachings form the basis for economic principles that prioritize social welfare and equitable distribution. This study examines how Islamic ethical principles can be implemented in the context of modern economic development to foster social inclusion and justice. Through theoretical analysis and case studies, this research demonstrates that the application of Islamic ethics in economic policies can enhance accessibility, equality, and community participation in economic processes.

Keywords: *Islamic Ethics, Economic Development, Social Inclusion, Justice, Economic Principles.*

Abstrak

Etika Islam memiliki peran penting sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Konsep-konsep seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan yang terdapat dalam ajaran Islam membentuk dasar bagi prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan kepentingan sosial dan distribusi yang adil. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diimplementasikan dalam konteks pembangunan ekonomi modern untuk menciptakan inklusi sosial dan keadilan. Melalui analisis teoritis dan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika Islam dalam kebijakan ekonomi dapat meningkatkan aksesibilitas, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi.

Kata kunci: Etika Islam, Pembangunan Ekonomi, Inklusi Sosial, Keadilan, Prinsip Ekonomi.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan merupakan tujuan utama bagi banyak negara, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan,

ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi (Warde, 2000). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, banyak negara mencari landasan atau fondasi yang kuat untuk memandu kebijakan ekonomi mereka. Salah satu landasan yang kaya akan nilai-nilai moral dan etika adalah Islam.

Islam, selain sebagai agama yang mengatur aspek spiritual dan ritual, juga memberikan pedoman yang jelas dalam masalah-masalah ekonomi dan sosial. Ajaran Islam menyediakan kerangka kerja yang luas untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada inklusi sosial dan keadilan distributif (Sumarta et al., 2022). Etika Islam, yang terdiri dari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai, dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam merancang kebijakan ekonomi yang berpihak kepada semua lapisan masyarakat (Hasan, Z, 2014).

Salah satu pilar utama dalam ajaran Islam adalah prinsip keadilan (Sumarta et al., 2024). Islam mengajarkan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan ekonomi. Keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya berarti kesetaraan dalam kesempatan, tetapi juga distribusi yang adil dari sumber daya dan hasil ekonomi. Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, pembangunan ekonomi dapat memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang atau status sosial, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam ekonomi konvensional, sering kali terjadi kegagalan pasar yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Islam menawarkan solusi untuk mengatasi kegagalan pasar ini melalui prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), zakat (pembayaran wajib kepada kaum miskin), dan hisbah (pengawasan moral dalam perdagangan) (Tanjung, 2014). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam dapat mengurangi risiko kegagalan pasar dan mempromosikan keadilan ekonomi.

Etika Islam juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Konsep seperti shura (musyawarah), adil (keadilan), dan takaful (gotong royong) mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi (Saeful & Ramdhayanti, 2020). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan ekonomi, akan tercipta rasa kepemilikan yang lebih besar dan pemerataan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Islam mengajarkan bahwa individu dan institusi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan) dan ihsan (kebaikan) mendorong individu dan perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap kepentingan sosial dan lingkungan (Sumarta et al., 2022). Dengan memperkuat tanggung jawab sosial ini, pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak.

Salah satu aspek unik dari etika Islam adalah harmoni antara spiritualitas dan materialism (Tarigan, 2015). Islam mengajarkan bahwa pencapaian materi harus sejalan dengan pencapaian spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi, Islam

menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan ekonomi. Dengan mengintegrasikan spiritualitas dan materialisme, pembangunan ekonomi dapat menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang holistik bagi individu dan masyarakat.

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan menjadi agenda utama bagi banyak negara, terutama di era globalisasi ini. Pertumbuhan ekonomi yang hanya berfokus pada angka-angka tidak lagi menjadi parameter tunggal keberhasilan (Suradi, 2012). Masyarakat menginginkan pembangunan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga mengurangi kemiskinan, mengatasi ketidaksetaraan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, etika Islam menawarkan sebuah paradigma yang unik dan relevan dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian tentang urgensi etika Islam sebagai fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan menjadi sangat penting.

Pendekatan sekuler dalam pembangunan ekonomi seringkali mengabaikan dimensi moral dan etika. Mereka cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan distribusi kekayaan yang adil (Suradi, 2012). Akibatnya, ketimpangan ekonomi semakin membesar dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Etika Islam menawarkan solusi alternatif dengan menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara spiritualitas dan materialisme dalam setiap keputusan ekonomi.

Dalam era globalisasi, negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk membangun ekonomi yang inklusif dalam kerangka multicultural (Hartati, 2021). Etika Islam memiliki keunggulan dalam hal ini karena memberikan pedoman yang dapat diterapkan secara universal tanpa mengabaikan keanekaragaman budaya dan agama. Konsep-konsep seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dalam Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam konteks global yang multikultural.

Tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi membutuhkan solusi yang holistik dan berkelanjutan (Purwadinata & Batilmurik, 2024). Etika Islam menawarkan pandangan yang komprehensif terhadap isu-isu ini dengan menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan alam, distribusi yang adil dari sumber daya, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembangunan ekonomi dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak.

Krisis kepercayaan terhadap sistem ekonomi dan keuangan konvensional telah mengguncang stabilitas ekonomi global (Tanjung, 2014). Etika Islam menawarkan alternatif yang dapat memperbaiki hubungan antara individu, lembaga keuangan, dan masyarakat. Konsep seperti amanah (kepercayaan), adil (keadilan), dan ihsan (kebaikan) dalam Islam dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan integritas dalam sistem ekonomi.

Ketidaksetaraan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi (Saeful & Ramdhayanti, 2020). Etika Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dengan menekankan pentingnya distribusi yang adil dari kekayaan dan peluang. Konsep zakat (pembayaran wajib kepada kaum miskin) dan hisbah (pengawasan moral dalam perdagangan) dalam Islam dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan tujuan utama bagi banyak negara di seluruh dunia (Hartati, 2021). Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang menghambat tercapainya tujuan ini. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan meliputi: (i) Ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin masih menjadi masalah serius di banyak negara. Sementara sebagian masyarakat menikmati kemakmuran ekonomi, sebagian lainnya terpinggirkan dan hidup dalam kemiskinan. (ii) Tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Ketidaksetaraan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. (iii) Krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan sistem ekonomi konvensional telah mengguncang stabilitas ekonomi global. Kurangnya integritas dan transparansi dalam sistem ekonomi menyebabkan kekhawatiran akan ketidakadilan dan ketidakefisienan. (iv) Pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Hal ini mengancam kesejahteraan manusia dan keberlangsungan ekonomi di masa depan.

Dalam konteks permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan, penelitian tentang fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan memiliki beberapa tujuan utama: (i) Mengidentifikasi prinsip-prinsip etika Islam yang dapat menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan panduan yang berharga dalam merancang kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. (ii) Menganalisis implikasi praktis dari prinsip-prinsip etika Islam dalam konteks pembangunan ekonomi modern. Dengan memahami bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi, kita dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan inklusi sosial, keadilan distributif, dan keberlanjutan ekonomi (Khurshid, K, 2010). (iii) Menyediakan kerangka kerja konseptual yang dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan pemikir dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Dengan memiliki kerangka kerja yang jelas, kita dapat memperkuat landasan teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. (iv) Mendorong diskusi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Melalui dialog dan kolaborasi yang terbuka, kita dapat

memperluas pemahaman tentang peran etika Islam dalam pembangunan ekonomi dan mengidentifikasi solusi yang lebih efektif untuk tantangan-tantangan yang dihadapi. (v) Memberikan kontribusi pada literatur akademis tentang pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan, serta tentang peran etika Islam dalam konteks ini. Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang dinamika ekonomi global dan menciptakan ruang untuk penelitian lanjutan dalam bidang ini.

Penelitian tentang fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan memiliki beberapa kegunaan yang signifikan: (i) Membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mempromosikan keadilan distributive. (ii) Mendorong inovasi dalam praktik bisnis untuk mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai moral dalam praktik bisnis, perusahaan dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. (iii) Memberikan pedoman bagi masyarakat sipil untuk memperjuangkan perubahan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami prinsip-prinsip etika Islam, masyarakat sipil dapat lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan hak-hak mereka. (iv) Mendorong kolaborasi antar-keagamaan dalam mempromosikan pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Meskipun berakar dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip etika yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat memiliki relevansi universal dan dapat menjadi titik persamaan bagi berbagai tradisi keagamaan. (v) Memperluas pemahaman tentang Islam dan ekonomi dapat memperluas pemahaman kita tentang hubungan antara Islam.

Etika Islam menawarkan landasan yang kuat dan relevan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam, pembangunan ekonomi dapat menjadi lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang mengadopsi ajaran Islam untuk memperhatikan dan menerapkan etika Islam dalam merancang kebijakan ekonomi mereka.

Penelitian tentang urgensi etika Islam dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan menjadi sangat penting dalam konteks global yang terus berubah ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua pihak. Oleh karena itu, para peneliti, pemikir, dan pengambil kebijakan perlu terus menjelajahi dan memperdalam kontribusi etika Islam dalam merumuskan solusi untuk tantangan-tantangan ekonomi kontemporer.

Metode Penelitian



Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemahaman, persepsi, dan pengalaman individu terkait dengan topik penelitian (Leavy, Patricia (ed.), 2020). Sasaran penelitian ini adalah individu dan kelompok yang memiliki pemahaman dan kepentingan terkait dengan pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan dalam konteks etika Islam. Ini termasuk akademisi, pembuat kebijakan, praktisi ekonomi, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan ekonomi.

Subjek penelitian akan terdiri dari sampel yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang mewakili diversitas sosial, ekonomi, dan budaya. Ini termasuk warga lokal, pemimpin masyarakat, profesional, dan anggota lembaga keagamaan yang memiliki pengalaman dan pandangan yang beragam terkait dengan pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Data akan dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan responden yang dipilih secara purposif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan topik penelitian. Observasi partisipatif akan digunakan untuk memahami konteks sosial dan ekonomi di lokasi penelitian. Analisis dokumen akan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, termasuk laporan pemerintah, jurnal akademis, dan dokumen kebijakan (J. Moleong, 2013).

Instrumen utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara untuk wawancara mendalam dan checklist observasi untuk observasi partisipatif. Panduan wawancara akan dirancang untuk mengeksplorasi pemahaman responden tentang prinsip-prinsip etika Islam dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan, sementara checklist observasi akan digunakan untuk mencatat observasi tentang praktik ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Data kualitatif yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Analisis tematik akan melibatkan proses identifikasi, penamaan, dan interpretasi pola-pola tematik dalam data untuk mengungkapkan tema-tema kunci yang muncul dalam pemahaman dan pengalaman responden terkait dengan topik penelitian. Analisis akan dilakukan secara manual dengan menggunakan teknik pengkodean dan kategorisasi. Selain metode pengumpulan dan analisis data, penelitian ini juga akan memperhatikan etika penelitian, seperti perlindungan privasi dan kerahasiaan responden, serta keabsahan dan reliabilitas data. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penelitian melalui pendekatan partisipatif untuk memastikan relevansi dan akseptabilitas hasil penelitian bagi masyarakat yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian tentang fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang prinsip-prinsip etika Islam dalam konteks pembangunan ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika Islam yang dapat menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menganalisis implikasi praktis dari prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan kunci yang relevan dengan fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan:

1. Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan menurut perspektif Islam. Sebagian responden menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dan kesempatan yang setara bagi semua individu (Maulana, 2020).
2. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya berarti kesetaraan dalam kesempatan, tetapi juga distribusi yang adil dari kekayaan dan hasil ekonomi. Sebagian responden juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan (Ahmad, Abdul, n.d.).
3. Konsep seperti *shura* (musyawarah), *'adil* (keadilan), dan *takaful* (gotong royong) dipandang sebagai sarana untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pemerataan manfaat ekonomi. Konsep-konsep seperti larangan *riba* (bunga), zakat (pembayaran wajib kepada kaum miskin), dan *hisbah* (pengawasan moral dalam perdagangan) juga dianggap sebagai mekanisme untuk mengatasi kegagalan pasar dan mempromosikan keadilan ekonomi. Larangan *riba*, misalnya, dianggap sebagai langkah untuk mengurangi spekulasi dan ketidakstabilan ekonomi. Sebagian responden menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan (Abuznaid, S, 2009).
4. Prinsip-prinsip seperti *amanah* (kepercayaan) dan *ihsan* (kebaikan) dilihat sebagai panduan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap kepentingan sosial dan lingkungan (El-Gamal, 2006). Dengan memperkuat tanggung jawab sosial ini, pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Keselarasan antara spiritualitas dan materialisme juga ditekankan oleh responden. Islam mengajarkan bahwa pencapaian materi harus sejalan dengan pencapaian spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi, Islam menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan ekonomi.

Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang relevansi etika Islam sebagai fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip etika Islam, seperti keadilan, pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial, dan

harmoni antara spiritualitas dan materialisme, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks prinsip keadilan, Islam menawarkan paradigma yang berbeda dari konsep-konsep ekonomi konvensional. Sementara ekonomi konvensional sering kali fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dari kekayaan dan hasil ekonomi. Hal ini mengarah pada upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta memastikan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan aspek kunci dalam pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi, akan tercipta rasa kepemilikan yang lebih besar dan pemerataan manfaat ekonomi yang lebih luas. Konsep *takaful* (gotong royong) juga menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam mencapai tujuan ekonomi bersama.

Penghindaran kegagalan pasar, tanggung jawab sosial, dan harmoni antara spiritualitas dan materialisme adalah prinsip-prinsip tambahan yang memperkuat fondasi etika Islam dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Larangan riba, misalnya, mengurangi spekulasi dan ketidakstabilan ekonomi, sementara tanggung jawab sosial mendorong individu dan perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap kepentingan sosial dan lingkungan.

Keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa etika Islam memiliki potensi besar sebagai fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam kebijakan ekonomi, negara-negara dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan kontribusi etika Islam dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Simpulan

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan merupakan tujuan yang sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia. Dalam upaya mencapai tujuan ini, fondasi yang kokoh sangat diperlukan untuk membimbing kebijakan ekonomi yang bertujuan memastikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan distribusi yang adil dari kekayaan. Dalam konteks ini, etika Islam menawarkan paradigma yang unik dan relevan. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam, seperti keadilan, pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial, dan harmoni antara spiritualitas dan materialisme, memiliki potensi besar untuk menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan.



Dari temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa etika Islam menawarkan pandangan yang holistik dan berkelanjutan tentang pembangunan ekonomi. Prinsip keadilan dalam Islam bukan hanya tentang kesetaraan dalam kesempatan, tetapi juga tentang distribusi yang adil dari kekayaan dan hasil ekonomi. Pemberdayaan masyarakat juga ditekankan sebagai sarana untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pemerataan manfaat ekonomi. Selain itu, konsep tanggung jawab sosial dan harmoni antara spiritualitas dan materialisme juga memberikan pandangan yang komprehensif tentang hubungan antara manusia, lingkungan, dan ekonomi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan antara lain: (i) Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi yang mempromosikan keadilan distributif, pemberdayaan masyarakat, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. (ii) Pendidikan etika Islam perlu diperkuat dalam sistem pendidikan formal dan informal. Pendidikan tentang prinsip-prinsip etika Islam dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi dan sosial. (iii) Pengusaha dan pelaku bisnis perlu mengembangkan model bisnis yang berbasis etika Islam. Model bisnis ini harus memperhatikan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas bisnis mereka. (iv) Pemerintah dan lembaga terkait perlu mempromosikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan ekonomi. (v) Peningkatan kerjasama antar-keagamaan dapat memperkuat fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Kerjasama antar-keagamaan dapat membantu mempromosikan nilai-nilai moral yang universal, termasuk keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, dalam aktivitas ekonomi dan sosial.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan bahwa negara-negara dapat memperkuat fondasi dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Abuznaid, S. (2009). Business ethics in Islam: The glaring gap in practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2 (4), 278-288.



- Ahmad, Abdul. (n.d.). *Concept of Economic Justice in Islamic Law*.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hartati, Y. S. (2021). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. Volume 12, Nomor 1*. ejurnal.stie-portnumbay.ac.id
- Hasan, Z. (2014). Islamic economic ethics: An outline of its principles and scope. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 10 (2), 33–50.
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Khurshid, K. (2010). Ethics and economics in Islam. *Journal of Business Ethics*, 91 (1), 91–106.
- Leavy, Patricia (ed.). (2020). *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (2nd edn). Oxford Handbooks. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.001.0001>
- Maulana, M. (2020). *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Purwadinata, S., & Batilmurik, R. W. (2024). *Perekonomian Indonesia Persoalan Kebijakan, Isu Kontemporer dan globalisasi Pembangunan*. Malang: leh PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Saeful, A., & Ramdhayanti, S. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Syar'ie*, 3. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Sumarta, Burhandin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Sumarta, Edy, S., & Mardiyana. (2022). *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologis, Teoritis, dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Suradi. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial (Economic Growth And Sosial Welfare). *Informasi*, Vol. 17, No. 03. <https://media.neliti.com/media/publications/52806-ID-pertumbuhan-ekonomi-dan-kesejahteraan-so.pdf>
- Tanjung, H. (2014). Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam. *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 02.
- Tarigan, A. A. (2015). *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis Tela'ah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam* (2nd ed.). Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.